



DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Mahmud. 2016. *Duhh...Pemkot Kehilangan PAD Rp4 Miliar* oleh, diunduh dari jabar.pojoksatu.id/bekasi/2016/01/11/duhh-pemkot-kehilangan-pad-rp4-miliar, diakses pada tanggal 16 Maret 2016.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fourth Edition*. California: Sage Publication.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2010-2015* diunduh dari slideplayer.info/slide/3627047, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.
- Efferin, Sujoko. 2015. Pemaparan dalam Kuliah Umum Penelitian Kualitatif: *Introduction to Qualitative Research*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fitra, Syahrul. 2014. *Peran Retribusi Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* diunduh dari <https://syahrulfitra.wordpress.com/2014/05/15/peran-retribusi-daerah-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah>, diakses pada tanggal 15 Maret 2016.
- Gunartha, I Dewa Komang Ary dan Nyoman Djinar Setiawina. 2013. *Analisis Potensi Retribusi, Efektivitas, Efisiensi dan Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 2009. *Managerial Accounting Akuntansi Manajerial Buku 1 Edisi 8*, Penerjemah: Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Taufik, dkk. (2007). *Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Khususnya Pelaksanaan Tera Ulang Meter kWh Di Balai Metrologi Wilayah Surakarta Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Tengah*. "DIALOGUE" JIAKP, Vol. 4, No. 1, Januari 2007:1-22.
- <http://garutnews.com/garut-bisa-peroleh-pad-teratera-ulang-sedikitnya-rp450-juta.html>, *Garut Bisa Peroleh PAD Tera Tera Ulang sedikitnya Rp450 Juta* diakses pada tanggal 27 Januari 2016.



<http://palembang.tribunnews.com/2014/07/01/bupati-lahat-targetkan-apbd-2015-rp-2-triliun>. *Bupati Lahat Targetkan APBD 2015 Rp2 Triliun* diakses pada tanggal 22 Februari 2016.

<http://www.rmolsumsel.com/read/2015/08/01/33742/Pemkab-dan-Dewan-Lahat-Tancap-Gas-Bahas-APBD-2016>. *Pemkab dan Dewan Lahat Tancap Gas Bahas APBD 2016* diakses pada tanggal 22 Februari 2016.

Ikatan Ahli dan Teknisi Metrologi Legal (Ikatmi).2015. *Kajian Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*. Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK).

Isa, Nasrul.2000. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Neuman, W. Laurence.2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Fourth Edition*.Pearson Education Company.

Nurcholis, Hanif.2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Poerwanto, Hendra. (2015). *Menghitung Biaya Per Unit*. diunduh dari <https://sites.google.com/site/pekembia/menghitung-biaya-per-unit>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

_____, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.



_____, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1037/M-DAG/Kep/11/2011 tentang Penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur.

_____, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 954/M-DAG/Kep/10/2012 tentang Penetapan Kota Surakarta sebagai Daerah Tertib Ukur.

_____, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 955/M-DAG/Kep/10/2012 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Daerah Tertib Ukur.

_____, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 956/M-DAG/Kep/10/2012 tentang Penetapan Kota Batam sebagai Daerah Tertib Ukur.

_____, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera.

_____, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Metoda Penghitungan Potensi PAD*. Yogyakarta: LKMPD.

Sukeji, Heny., dkk. 2014. *Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Setiadji, Bambang. 2013. *Modul Pengetahuan Umum Metrologi Legal*. Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK).



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada saat melakukan wawancara dengan para partisipan. Pertanyaan masih dapat berkembang untuk menangkap makna yang lebih mendalam atas permasalahan penelitian ini.

a. Pertanyaan untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pemerintah daerah dan APBD Kabupaten Lahat saat ini?
2. Apakah selalu terjadi peningkatan dan mencapai target?
3. Apa saja faktor pemicu peningkatan tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai peningkatan retribusi?
5. Bagaimana peluangnya?
6. Bagaimana pendapat Anda mengenai kontribusi retribusi dalam PAD berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat?
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen. Bagaimana pendapat Anda tentang kewenangan yang akhirnya dipindahkan ke kabupaten kota dari provinsi?
8. Apakah terdapat peluang dalam pelaksanaan amanat UU tersebut?
9. Apa saja langkah yang rencananya akan diambil oleh Dinas Perindag?
10. Bagaimana pendapat Anda terkait kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk meneraulangkan?
11. Bagaimana potensi UTTP meter listrik di Kabupaten Lahat?
12. Apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perindag terkait pendataan UTTP?
13. Menurut pendapat Anda, bagaimana potensi retribusi tera dan tera ulang jika telah dilaksanakan di Kabupaten Lahat?
14. Berkaitan dengan tarif tera dan tera ulang selama ini, bagaimana di Kabupaten Lahat yang telah dilakukan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan?
15. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera dan tera ulang, bagaimana caranya?



b. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemerintah daerah dan APBD Kabupaten Lahat saat ini?
2. Menurut Anda apa saja faktor-faktor sebagai pemicu peningkatan APBD?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai sektor retribusi?
4. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kewenangan yang akhirnya berpindah ke kabupaten kota melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
5. Apakah peningkatan PAD dapat ditingkatkan dari sektor metrologi legal?
6. Langkah apa yang sudah diambil atau perlu diambil nantinya terutama oleh Dinas Perindag Kabupaten Lahat?
7. Menurut Anda seperti apa pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan?
8. Menurut Anda bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi tera dan tera ulang?
9. Bagaimana pendapat Anda terkait regulasi dalam rangka mendukung penggalan potensi itu?
10. Bagaimana potensi jika dilakukan tera dan tera ulang secara mandiri oleh Kabupaten Lahat?
11. Bagaimana dengan SDM kemetrologian di Kabupaten Lahat?
12. Bagaimana pendapat Anda mengenai pendataan UTTP?
13. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera dan tera ulang, bagaimana caranya?

c. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang yang selama ini dilakukan?
2. Sampai tahun berapa pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan oleh Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kesadaran masyarakat dalam tera dan tera ulang?
4. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah daerah melalui retribusi pelayanan tera dan tera ulang ini?
5. Apa usulan yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perolehan retribusi ini?



6. Bagaimana pendapat Anda mengenai SDM kemetrolagian? Apakah sudah siap?
7. Bagaimana potensi retribusi jika tera dan tera ulang dilakukan secara mandiri oleh Kabupaten Lahat? Seperti apa?
8. Apa langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh Dinas Perindag Kabupaten Lahat?
9. Apa UTTP yang jumlahnya paling besar?
10. Berkaitan dengan proyeksi, tiap tahunnya akan bertambah berapa persen dari UTTP tersebut?
11. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi retribusi tera dan tera ulang? Apakah Kabupaten Lahat dapat memperoleh retribusi dari sektor ini?
12. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera dan tera ulang, bagaimana caranya?